

PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DALAM PEMBUATAN *E-FAKTUR* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN

Gita Putri Humairoh
NBI 1111408536

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

gitaputri972@gmail.com

ABSTRAK

Di era globalisasi ini, teknologi informasi semakin berkembang pesat di negara maju dan di negara berkembang. Untuk itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju *e-Government*. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, tujuan pengembangan *e-Government* untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Lembaga dari pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan salah satu program *e-Government* yang berupa faktur pajak elektronik (*e-Faktur*) secara bertahap pada tanggal 1 Juli 2014 untuk luar Jawa, 1 Juli 2015 untuk Jawa dan Bali dan serentak secara Nasional pada tanggal 1 Juli 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan *Electronic Government* dalam Pembuatan *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan informan/sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Electronic Government* dalam Pembuatan *e-Faktur* mencakup 8 Indikator elemen dari *e-Government* yaitu *Political Environment*, dimana kebijakan tersebut dibuat oleh DJP dan diatur dalam Peraturan Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. *Leadership*, peran pimpinan sudah berjalan cukup baik karena terdapat pembagian tugas kepada seksi yang bersangkutan dari program *e-Faktur*. *Planning*, dalam penerapannya sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. *Transparency/Visibility*, berjalan sesuai SOP akan tetapi masih ada kekurangan dalam penyampaian informasi yang kurang mendetail. *Budget*, pihak KPP tidak mengetahui rincian anggarannya dan pihak DJP yang menjadi pusat program ini. *Technology*, sudah berjalan cukup baik dengan memberikan kemudahan, akan tetapi Wajib Pajak sering mengalami kendala *error* untuk memprogram aplikasi *e-Faktur*. *Innovation*, masih perlu dikembangkan lagi supaya Wajib Pajak tidak mengalami kendala dalam pembuatan *e-Faktur*.

Kata kunci: Penerapan, Teknologi Informasi, *Electronic Government*, *e-Faktur*

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini lebih cenderung untuk menggunakan teknologi informasi yang bersifat elektronik karena lebih mudah untuk diakses dan lebih efisien dalam penggunaannya. Dengan adanya efisiensi, maka mempengaruhi kualitas dari hubungan interaksi masyarakat itu sendiri. Masyarakat saat ini lebih kritis untuk mengontrol hal – hal yang berhubungan dengan penerapan kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk di Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan teknologi informasi sebagai bagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengembangkan sistem teknologi informasi, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melaksanakan reformasi birokrasi menuju *e-Government*. Penyelenggaraan pemerintah tentunya dibutuhkan dana untuk membiayai program-program pemerintah yang telah ditetapkan, salah satunya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Indonesia. Dana tersebut diperoleh dari sumber penerimaan negara atau sumber dalam negeri, salah satunya penerimaan dari sektor perpajakan yang merupakan penghasilan utama dalam negeri yang telah dipercaya untuk melakukan tugas negara.

Modernisasi kebijakan *e-Faktur* dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan didampingi oleh AR (*Account Representative*) dalam melaporkan kewajibannya. Pelaporan pajak tidak bisa dibuat secara curang lagi karena pelaporan pajak dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui situs web <http://www.pajak.go.id/e-faktur>. Pengaksesan aplikasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak karena diaplikasi tersebut terdapat *username* dan *password* yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun dan terjamin kerahasiaan data Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan merupakan unit pelaksana dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak maupun yang belum terdaftar. Upaya - upaya dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik terkait dengan *e-Government* di KPP Pratama Surabaya Krembangan kepada masyarakat. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang terkait dengan pelayanan pegawai KPP Pratama Surabaya Krembangan diantaranya yaitu informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak mengenai persyaratan formulir *e-Faktur* masih kurang jelas sehingga menyebabkan Wajib Pajak kembali lagi untuk mengambil kekurangan berkas persyaratan, Wajib Pajak masih mengalami kendala dalam pembuatan *e-Faktur* karena sering terjadinya aplikasi sistem yang *error*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat skripsi dengan judul penelitian mengenai “Penerapan *Electronic Government* dalam Pembuatan *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Penerapan *Electronic Government* dalam Pembuatan *E-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan?”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan *Electronic Government* dalam Pembuatan *E-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi *E-Government*

Menurut Pascual (2003), *e-Government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman jasa atau pelayanan *government* untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, pekerja dan *partner* bisnis.

Model *E-Government*

Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume II Tahun 2005, menyebutkan ada beberapa Model pelayanan *e-Government*, yaitu :

1. *Government to Citizen (G2C)*, yaitu interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.
2. *Government to Business (G2B)*, yaitu interaksi antara pemerintah dengan pembisnis.
3. *Government to Government (G2G)*, yaitu interaksi antara pemerintah dengan pemerintah.

Jenis Pelayanan *E-Government*

Indrajit (2006:29) mengemukakan bahwa Jenis-jenis *Electronic Government (e-Government)*, yaitu : 1) Publikasi, mempublikasikan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pihak lain melalui internet. 2) Interaksi, komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. 3) Transaksi, lebih dari hubungan komunikasi karena terdapat perpindahan uang dari satu ke pihak lain.

Indikator Elemen *E-Government*

8 Indikator Elemen Sukses Manajemen *e-Government* menurut Indrajit (2002) meliputi : 1) *Political Environment* yaitu latar belakang program tersebut dibuat . 2) *Leadership* yaitu peranan dari pimpinan. 3) *Planning* yaitu proses persiapan dan perencanaan dari awal pelaksanaan program. 4) *Stakeholders* yaitu pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tak langsung dalam pelaksanaan. 6) *Tranparancy/visibility* yaitu ketersediaan informasi untuk *Stakeholder* dalam pelaksanaan program. 7) *Budgets* yaitu anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program. 8) *Technology* yaitu infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan program. 9) *Innovation* yaitu kemampuan dari para aparat yang terlibat dalam pengelolaan program tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan mempunyai 8 Indikator Elemen Sukses Manajemen *e-Government* menurut Indrajit (2002) meliputi : 1) *Political Environment*, 2) *Leadership*, 3) *Planning*, 4) *Stakeholders*, 5) *Tranparancy/Visibility*, 6) *Budgets*, 7) *Technology*, 8) *Innovation*.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pajak Pratama Surabaya Krembangan berkedudukan di Gedung Keuangan Negara 1 Jalan Indrapura No. 5 Surabaya.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari:

1. Pegawai di bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
2. Pegawai di bagian Penanganan *e-Faktur*.
3. Wajib Pajak

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian.
2. Data sekunder berupa data pendukung lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan yang berupa dokumen mengenai gambaran umum kantor, peranan kantor, visi dan misi, tugas dan fungsi kantor serta bagan struktur organisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di KPP Pratama Surabaya Krembangan, diketahui bahwa keberhasilan penerapan *e-Government* dalam pembuatan *e-Faktur* dilihat dari 8 indikator sebagai berikut :

Pertama, *Political Environment*, yaitu latar belakang program kebijakan itu dibuat. Yang mencakup didalamnya terdapat pihak-pihak yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan penerapan program *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa tujuan dari latar belakang permasalahan *e-Faktur* sudah berhasil dilaksanakan karena sudah diberlakukan secara bertahap pada 1 Juli 2014 di Luar Pulau Jawa, 1 Juli 2015 di Pulau Jawa dan Bali dan 1 Juli 2016 dilakukan secara serentak, dengan bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan dan pelaporan serta telah dilaksanakan serentak secara Nasional. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya pemakaian kertas karena digantikan dengan aplikasi online sehingga pelaporannya bisa melalui aplikasi *e-Faktur* tersebut, tidak memakan waktu dan biaya dalam penggunaannya, Wajib Pajak bisa menggunakan aplikasi ini kapan dan dimana saja dan aplikasi ini bersifat *privacy* karena hanya wajib pajak yang mengetahui *username password* diaplikasi tersebut sehingga aman untuk menyimpan data perusahaan/pribadi.

Kedua, *Leadership*, yaitu peranan dari pimpinan yaitu Kepala Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Krembangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *e-Faktur*. Hasil penelitian membuktikan bahwa pimpinan sudah berperan serta mengkoordinir langsung dalam kebijakan pembuatan *e-Faktur* yang telah dilaksanakan oleh DJP serta memberikan pengarahan kepada Staff/Pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Akan tetapi, untuk kecepatan waktu masih perlu diperbaiki lagi agar Wajib Pajak tidak terlalu menunggu lama. Sebagai pimpinan mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan, selain itu pimpinan harus mempunyai tugas yang jelas terhadap program yang sedang berjalan ini untuk saling bertanggungjawab kepada unit di bawahnya. Pimpinan juga mempunyai tugas mengorganisasi mengenai *e-Faktur* mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya yang berurusan dengan pegawai/seksi yang mempunyai tanggungjawab terhadap *e-Faktur*.

Ketiga, *Planning*, yaitu proses persiapan dan perencanaan dari awal pelaksanaan *e-Faktur* Mulai dari perencanaan dan sampai pada pelaksanaan. Hasil penelitian membuktikan persiapan dan perencanaan sudah sesuai dengan SOP sehingga pelaksanaan program *e-Faktur* berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan kenyamanan, keamanan, serta kenyamanan yang sudah sesuai dengan SOP. Awal dari munculnya *e-Faktur* adalah tingginya angka pelanggaran pajak yang salah satunya pembuatan faktur pajak manual yang fiktif. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah kebijakan berupa *e-Faktur* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan perencanaan yang berupa sosialisasi, pelayanan hingga pembagian pegawai/seksi mengenai *e-Faktur*.

Keempat, *Stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tak langsung dalam pelaksanaan *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak ada pihak lain yang berwenang dalam pelaksanaan perpajakan selain DJP sendiri. *Stakeholder* selain Wajib Pajak dan KPP Pratama Surabaya Krembangan, ada juga Direktorat Jenderal Pajak Pusat yang mengawasi melalui laporan yang masuk ke *database*.

Kelima, *Transparency/Visibility*, yaitu ketersediaan informasi untuk *Stakeholder* dalam pelaksanaan *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Berupa keterbukaan dan kemudahan akses melalui web. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketersediaan informasi maupun sosialisasi *e-Faktur* yang diberikan oleh KPP sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dalam hal pemberian informasi agar tidak terjadi simpang siur. Hal ini dibuktikan dengan pemberian informasi kepada Wajib Pajak dengan cara mensosialisasikan kebijakan *e-Faktur* yaitu dimulai dari sebelum program itu dilaksanakan.

Keenam, *Budgets*, yaitu anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan *E-faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Anggaran yang seluruhnya dibebankan dari APBN. Hasil penelitian membuktikan bahwa mengenai anggaran hanya DJP yang mengetahui dan dalam pembuatan *e-Faktur* tidak dipungut biaya.

Ketujuh, *Technology*, yaitu infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan *E-faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan Mulai dari aplikasi, pengembangan dan kemudahan memperoleh aplikasi yang digunakan dalam penerapan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem teknologi yang disediakan dalam pembuatan *e-Faktur* oleh pusat atau DJP. KPP sebagai pelaksana saja yang menyediakan sarana dan prasarannya. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPP sudah baik karena kenyamanan dirasakan oleh Wajib Pajak. Namun, masih ada kendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak mengenai peng-*upgrade*-an dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi harus men-*download* terlebih dahulu.

Kedelapan, *Innovation*, yaitu kemampuan dari para aparat yang terlibat dalam pengelolaan *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Krembangan Surabaya. Hasil penelitian membuktikan bahwa KPP tidak ada pengembangan inovasi aplikasi karena semua sistem terhubung dari pusat atau DJP langsung. Inovasi yang dilakukan oleh DJP masih kurang karena menurut Wajib Pajak sistem *e-Faktur* masih sering terjadi error sehingga perlu dibenahi lebih baik lagi. Selain itu keahlian dari petugas perpajakan sudah terampil dalam pengoperasian *e-Faktur* sehingga dalam melayani Wajib Pajak bisa berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan *Electronic Governmnt* dalam Pembuatan *e-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan dalam pelaksanaan program *e-Faktur* ini dihasilkan dari 8 elemen indikator *e-Government*, yaitu : *Political Environtment*, sudah sesuai dengan tujuan awal program *e-Faktur*, hal ini dibuktikan pemberlakuan *e-Faktur* pada tanggal 1 Juli 2014 di Luar Pulau Jawa, 1 Juli 2015 di Pulau Jawa dan Bali, dan dilaksanakan secara serentak pada 1 Juli 2016. *Leadership*, dalam penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan, peran pimpinan sudah berjalan cukup baik karena terdapat pembagian tugas kepada seksi yang bersangkutan untuk menangani program *e-Faktur*. *Planning*, dalam penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan sudah sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama. *Stakeholders*, dalam penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan maupun Wajib Pajak sudah mendukung untuk memperlancar pelaksanaan *e-Faktur*. *Budget*, dalam penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan, hanya pihak DJP yang mengetahui rincian anggarannya sehingga KPP hanya unit pelaksana dari program *e-Faktur* tersebut. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program *e-Faktur* ini mengenai indikator yaitu : *Transparency/Visibility*, dalam penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan sudah berjalan sesuai SOP dengan memberikan kegiatan sosialisasi secara langsung dan juga bisa menggunakan layanan *online* melalui situs resmi DJP. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal penyampaian informasi yang kurang mendetail. *Technology*, dalam penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan sudah berjalan cukup baik memberikan kemudahan, akan tetapi Wajib Pajak sering mengalami kendala dalam pembuatan cetak faktur karena sistem *uplode* sering menolak dan aplikasi sering terjadi *error*. *Innovation*, dalam penerapan *e-Faktur* di KPP Pratama Surabaya Krembangan masih perlu dikembangkan lagi dalam program *e-Faktur* ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran yang dapat menjadi masukan agar dalam penerapan *e-Faktur* dapat lebih baik lagi, saran tersebut yaitu :

1. Diharapkan untuk kedepannya agar Wajib Pajak lebih sadar untuk menjalankan kewajiban membayar pajak karena ikut andil dalam kontribusi Negara.
2. Untuk *upgrade* atau penyempurnaan aplikasi dapat dilakukan secara berkala agar wajib pajak tidak sering melakukan download serta tidak mengganggu kenyamanan bagi Wajib Pajak
3. KPP Pratama Surabaya Krembangan diharapkan dapat memberikan informasi maupun sosialisasi bagi Wajib Pajak dalam hal penggunaan aplikasi *E-Faktur* serta mengajak Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban pajak mereka tanpa dikenai sanksi akibat melanggar peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ochim. (2009, Juli 30). *Peran Peneliti*. Retrieved from <http://masrochim.blogspot.co.id/2009/07/peran-peneliti.html>
- Cokroaminoto. (2011, Januari 04). *Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. Retrieved from <http://www.menulisproposalphelitian.com/2011/01/keabsahan-data-penelitian-kualitatif.html>

- Donny Danumarta Nurmahendra. (2017). *Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (2), 469-482.
- Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung. (2017). *Analisis Penerapan E-Faktur pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado*. ISSN, 2303-1174.
- Ayu Aditya Oktavya. (2015). *Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 1433 – 1447.
- Ary Kurniawan, Fitrotun Niswah S.AP,.M.AP. (2015). *Penerapan E-Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)*, hal 3-5.
- Santy Nurina Aprilia, Andy Fefta Wijaya, Suryadi. (2014). *Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)*. *Wacana– Vol. 17, No. 3*.
- Toni Heryana dan Sari Kartika Dewi. (2013). *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur*. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 1 (1), 2013, 38-49.
- Dwi Ayu Pranalia. (2015). *Manajemen Electronic Government dalam Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. ISSN : 2442-6962, Vol. 4, No. 2.
- Agustin Tyasminingsih. (2016). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Neneng Sti Maryam. (2016). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1*.
- Husnurrosyidah, Suhadi. (2017). *Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Halaman 97-106.
- Juventia Leowardi. (2017). *Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan E-SPT Masa PPN (Studi Kasus pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying) (Skripsi)*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Mulyandaru Trianto. (2015, Juni 12). *Metode Penelitian Menurut Sugiyono (2013)*. Retrieved from <http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996). hal 15
- M. Richard Steers. *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1999), hal. 159
- Ahmad Tanze., *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jogjakarta: Teras, 2011), hal 167
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Peraturan Faktur Elektronik*. <http://www.pajak.go.id/ketentuan-e-faktur>